

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DOSEN PEMULA**



**ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KOPERASI  
(PERSPEKTIF SISTEM INFORMASI DALAM STUDI KASUS KOPERASI SETIA BHAKTI  
WANITA DI SURABAYA)**

**TIM PENELITI**

- 1) Ketua : Martinus Sony Erstiawan, SE.,MSA  
NIDN : 0710037902
- 2) Anggota : Tony Soebijono, SE, SH.,M.Ak  
NIDN : 0703127302

**Dibiayai oleh :**

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan dan Pengembangan Kementerian Riset  
Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
120/SP2H/LT/DRPM/IV/2017 Tanggal 03 April 2017**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA STIKOM SURABAYA  
OKTOBER 2017**

**KONTRAK PENELITIAN**  
**Penelitian Dosen Pemula**  
**Tahun Anggaran 2017**  
**Nomor: 005/ST-PPM/KPJ/V/2017**

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Tutut Wuriyanto, M. Kom** : Kepala Bagian Penelitian & Pengabdian Masyarakat (PPM), Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya yang berkedudukan di Jalan Raya Kedung Baruk 98 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Martinus Sony Erstiawan, S.E., MSA** : Dosen Prodi S1 - Akuntansi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2017 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** dan mempunyai anggota peneliti sebagai berikut :
  - Tony Soebijono, SE., SH., M.Ak.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Ruang Lingkup Kontrak**

**PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2017 dengan judul Analisis Good Corporate Governance Pada Koperasi Wanita (Perspektif Sistem Informasi Dalam Studi Kasus Koperasi Wanita Setia Bakti Wanita Disurabaya).

**Pasal 2**  
**Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. 17.500.000,- (**Tujuh Belas Juta Lima Ratus Rupiah**) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017, tanggal 07 Desember 2016.

### Pasal 3

#### Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu  $70\% \times \text{Rp.17.500.000,-} = \text{Rp. 12.250.000,-}$  (*Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu  $30\% \times \text{Rp.17.500.000,-} = \text{Rp. 5.250.000,-}$  (*Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian.
  - c. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: Martinus Sony Erstiawan
NomorRekening	: 5200304278
Nama Bank	: Bank Central Asia (BCA)

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

### Pasal 4

#### Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 3 April 2017** dan berakhir pada **Tanggal 31 Oktober 2017**

### Pasal 5

#### Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa Jurnal Nasional Ekonomi.
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa Buku Ajar.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.



## Pasal 6

### Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Dosen Pemula dengan judul Analisis Good Corporate Governance Pada Koperasi Wanita (Perspektif Sistem Informasi Dalam Studi Kasus Koperasi Wanita Setia Bakti Wanita Disurabaya) dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

## Pasal 7

### Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan dan Catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS paling lambat **30 Agustus 2017**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **8 September 2017**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS paling lambat **30 Oktober 2017** (bagi penelitian tahun terakhir).
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
  - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian  
Nomor: 079/SP2H/K2/KM/2017

## **Pasal 8** **Monitoring dan Evaluasi**

**PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2017 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## **Pasal 9** **Penilaian Luaran**

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

## **Pasal 10** **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## **Pasal 11** **Penggantian Ketua Pelaksana**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## **Pasal 12** **Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.



- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 13** **Pembatalan Perjanjian**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 14** **Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 15** **Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 16** **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

#### **Pasal 17** **Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.

- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Tutut Wurijanto, M.Kom  
NIDN: 0703056702

PIHAK KEDUA



METERAI  
TEMPEL  
0517FAEF295876163  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Martinus Sony Erstiawan, S.E., MSA  
NIDN: 0710037902

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis



Dr. Drs. Antok Supriyanto, M.MT.  
NIDN: 0726106201

## HALAMAN PENGESAHAN

: ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
PADA KOPERASI WANITA(PERSPEKTIF SISTEM  
INFORMASI DALAM STUDI KASUS KOPERASI  
WANITA SETIA BAKTI WANITA DISURABAYA)

: MARTINUS SONY ERSTIAWAN, S.E., M.SA  
: Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya  
: 0710037902  
: Asisten Ahli  
: Akuntansi  
: 08113420035  
: martinus@stikom.edu

: TONY SOEBIJONO S.E.  
: 0703127302  
: Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya

: -  
: -  
: -

: Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun  
: Rp 0  
: Rp 17.,500.,00,0,-

Mengetahui,

Kepala Lembaga Ekonomi dan Bisnis

Kota Surabaya, 26 - 10 - 2017  
Ketua,



( MARTINUS SONY ERSTIAWAN, S.E.,  
M.SA)  
NIP/NIK 150848

(Tutut Wuriyanto, M.MT.)  
NIP/NIK 890032

Menyetujui,  
Kepala Lembaga Penelitian



(Tutut Wuriyanto, M.Kom)  
NIP/NIK 900036



## DAFTAR ISI

.....	1
.....	1
.....	1
.....	3
.....	3
.....	4
..... penelitian terhadap Peningkatan Mutu .....	4
..... Target Luaran .....	4
.....	5
.....	5
..... Persepsi Persepsi Indonesia .....	5
.....	5
..... pada Koperasi Indonesia .....	5
..... Koperasi di Indonesia .....	6
..... Keanggotaan Koperasi .....	7
..... Governance (GCG) .....	8
..... Corporate Governance .....	8
..... Corporate Governance .....	9
..... penerapan Good Corporate Governance .....	10
..... GCG .....	10
..... Efektivitas Good Corporate Governance (GCG) .....	11
..... Good Corporate Governance .....	11
.....	12
..... dalam sistem .....	12
..... sebuah sistem .....	12
.....	13

..... Good Corporate Governance .....	14
..... dan Koperasi .....	15
..... ..	17
..... ..	17
..... ..	17
..... ..	17
..... Dan Teknik Penentuan Data .....	20
..... ..	20
..... dan Definisi Operasional .....	21
..... ..	21
..... ..	25
..... ..	25
..... ..	26
..... ..	31
..... ..	34
..... ..	35
..... ..	37
..... ..	38
..... DAN PEMBAHASAN .....	38
..... ..	38
..... ..	49
..... ..	50
..... ..	56
..... ..	64
..... ..	74
..... ..	77

.....	77
.....	77
.....	78
.....	80
..... Draft Jurnal Penelitian.....	84
..... Struktur Organisasi Tim Peneliti.....	100
..... Biodata Ketua Dan Anggota Tim Pengusul.....	101
..... Quisioner.....	105
..... Hasil Quisioner Anggota Koperasi.....	113
..... Hasil Dokumentasi Quisioner dan Wawancara.....	136
..... Daftar Pustaka.....	139



## BAB I PENDAHULUAN

Disektor perekonomian dapat menumbuhkan minat tenaga kerja untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Koperasi merupakan kumpulan orang yang memiliki prinsip kekeluargaan, keterbukaan dan berperan dalam pengembangan koperasi yang bersifat sukarela dan anggota. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 (satu) sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ayat rasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan. Dalam Sukidjo (2008) mengatakan bahwa pemerintah harus untuk menjaga kelestarian dan mengembangkan koperasi sebagai sektor ekonomi yang kuat sebagai soko guru perekonomian

Koperasi di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2013 berjumlah 143.117 dan tahun 2014 berjumlah 147.249 dari jumlah tersebut tahun jumlah koperasi meningkat sebesar 4.132. Hal ini menunjukkan peran pemerintah daerah dalam mendampingi dan mengembangkan kelembagaan dengan bantuan pendidikan, dan penelitian koperasi yang disebut di Undang-Undang No. 25 tentang perkoperasian. Menurut sudarto (2015) mengatakan pemerintah perlu dipertajam dalam membina koperasi melalui khususnya meningkatkan apresiasi dan minat masyarakat

UUD Republik Indonesia dengan tujuan koperasi untuk pengusaha kecil dan menengah, menjadi pelaku ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan mekanisme pasar yang berbasis Sumber Daya Alam dan Sumber manusia mandiri, maju, berdaya saing, berawasan lingkungan dan dalam koperasi. Koperasi tidak serta merta semuanya

permasalahan dengan baik, permasalahan demi permasalahan diantaranya orientasi, kemampuan memgerakkan koperasi yang masih kurang konsisten dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kerja dan usaha.

Salah satu koperasi masih terdapat kendala yang dihadapi oleh koperasi, tidak memiliki kekuatan anggota dalam menentukan arah, tidak memiliki modal yang cukup, tidak memiliki anggota yang kompeten, tidak memiliki tata kelola yang baik, dan kualitas koperasi dalam pengembangan strategi kerjasama dengan pihak luar dan pihak lain yang masih kurang. Pengelolaan manajemen koperasi yang berlaku diantaranya AD/ART, kebijakan, struktur organisasi dan lain-lain yang memiliki fungsinya masing-masing sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan pengelola dilakukan secara tersistem dalam kerangka yang berlandaskan visi dan misi serta tata kelola (*Good Corporate Governance*) koperasi yang transparan, mandiri, memiliki akuntabilitas, kejujuran dan kewajaran. Serta kurangnya perhatian sistem informasi dalam koperasi untuk mempermudah informasi dan mempermudah pengambilan keputusan lebih cepat. *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang harus menjamin terpenuhinya kewajiban kepada *Shareholder* (Pemegang Saham) dan seluruh *stakeholder* lainnya untuk mampu bekerjasama dalam mencapai tujuan perusahaan.

Salah satu *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan pada koperasi agar dalam pengelolaan koperasi dapat merubah sistem manajemen untuk menciptakan kinerja, pengendalian internal yang baik dan tata kelola koperasi yang profesional dan akuntabel serta bertanggung jawab bagi *stakeholder* serta *shareholder* dan didukung dengan pemanfaatan perkembangan teknologi lebih bermanfaat. Menurut Puspitasari dan Ludigdo (2016) mengatakan bahwa koperasi yang tidak diselenggarakan dengan baik dapat menimbulkan masalah pengendalian internal seperti pemanfaatan kepentingan pribadi, maupun praktik korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu hambatan dalam Puspitasari dan Ludigdo (2016) kondisi ini masih terkelola oleh orang atau bersifat subyektif, serta masih ada yang bisa menghambat terlaksananya tujuan. Peran *Good Corporate Governance* (GCG) sangat dibutuhkan sehingga kinerja organisasi dapat menciptakan tata kelola yang baik. Peran masyarakat pun sangat penting dalam pengembangan prioritas bisnis dengan dapat mendengarkan masukan langsung berinteraksi kepada masyarakat. Peran sistem informasi serta informasi yang dibutuhkan oleh organisasi dan dapat memperoleh hasil kerja yang lebih konsisten, dan dapat meningkatkan peluang dalam berbisnis, serta memudahkan perolehan informasi sehingga tercipta kepercayaan timbal balik antara perusahaan.

Salah satu visi dan misi serta perkembangan Koperasi di Indonesia masih diperlukan tata kelola yang baik dalam mengelola tanggungjawab, independen, responsibilitas, kewajaran dan hasil akhir dalam perkembangannya dimasa yang akan datang. Koperasi memiliki berbagai jenis usaha dan dapat berkembang dalam berbagai wilayah. Usaha dalam mendukung Koperasi diperlukan tata kelola yang baik, pemanfaatan teknologi dan dapat mengimplementasikan kualitas manajemen yang baik. Ketua Koperasi sampai dengan para anggota koperasi dapat bertanggungjawab dengan dukungan sistem informasi.

Salah satu latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dihadapi dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Koperasi menggunakan perspektif sistem informasi (Studi kasus pada Koperasi Wanita di Surabaya).

Salah satu implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perpektif Koperasi pada koperasi wanita di Surabaya.



penelitian implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sistem informasi pada koperasi wanita di Surabaya.

#### **Kelebihan / Luaran**

yang memiliki daya saing dalam pengembangan dan pelebaran peran penting bagi koperasi, oleh sebab itu penilaian dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menggunakan pespektif system informasi guna menghasilkan pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggungjawabkan.

#### **Kelebihan terhadap Peningkatan Mutu**

di harapkan memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi dunia dengan menemukan penilaian implementasi *Good Corporate Governance* menghasilkan sistem informasi yang akurat dan dapat bertanggungjawabkan.

penilaian dari pengemplementasian *Good Corporate Governance* pada koperasi yang akan dapat digunakan sebagai menerapkan system informasi *Good Corporate Governance*

Jenis Luaran		Indikator Capaian
Ilmiah di Jurnal Nasional		Ekonomi / Draff
dalam pertemuan ilmiah	Nasional	Draff
	Lokal	Terdaftar
		Draff
Jika ada		Tidak ada
Teknologi (TKT)		Tidak ada

### BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian menggunakan *Research and Development* (R&D) dengan menggunakan metode *Research and Development* (R&D) merupakan pengembangan pada sebuah produk untuk menguji keefektifan produk (Sugiono, 2011). Dalam hal ini produk yang dimaksud adalah koperasi koperasi yang masih dapat mengembangkan anggota dan usaha koperasi digunakan oleh masyarakat luas bukan hanya anggota koperasi itu sendiri dapat menyejahterakan masyarakat sekitar koperasi.

#### Penyusunan Data

##### Penelitian dan survey dokumen

Penelitian pendahuluan dalam menginterpretasikan sebuah ketertarikan untuk melakukan penelitian dalam menerapkan *Good Corporate Governance* pada koperasi awal mulanya berasal dari jurnal-jurnal penelitian baik yang berkaitan dengan ilmu akuntansi maupun berkaitan dengan koperasi dilanjutkan dengan membaca majalah, skripsi, tesis, buku, dan lain-lain (media massa cetak) dan disertasi. Informasi yang diperoleh tidak hanya yang disebutkan sebelumnya namun peneliti menggunakan pencarian informasi melalui pendapat para ahli, dokumen, dan mendownload melalui penggunaan website berupa [www.dinkop-surabaya.go.id](http://www.dinkop-surabaya.go.id) atau [www.dinkop-surabaya.go.id](http://www.dinkop-surabaya.go.id), [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com), [www.detik.com](http://www.detik.com), [www.bisnis.com](http://www.bisnis.com), [www.tempo.co](http://www.tempo.co), dan lain sebagainya yang mendukung peneliti dan tertarik untuk melanjutkan dalam bentuk penelitian yang dapat memberikan informasi sesuai dengan kondisi yang ada. Selanjutnya peneliti mencari informasi tentang koperasi yang dijadikan sebagai obyek penelitian dan peneliti terfokus pada koperasi yang akan dijadikan obyek penelitian.

Langkah awal peneliti yang dilakukan sebelum pemilihan topik survey terlebih dahulu. Survey dapat dilakukan melalui literatur, wawancara, sumber praktisi, proyeksi konstruksi dan konsultasi serta dengan rekan dosen. Survey dilakukan di lingkungan BUMN dan Koperasi.

Proses survey dilakukan dalam beberapa tahapan, yakni:

- 1. Menentukan masalah penelitian ;
- 2. Menentukan desain survei ;
- 3. Menentukan instrumen survei;
- 4. Menentukan sampel;
- 5. Melakukan pre-test;
- 6. Mengumpulkan data;
- 7. Memeriksa data (editing);
- 8. Mengkode data;
- 9. Menyusun;
- 10. Menghitung dan analisis data;
- 11. Interpretasi data; dan
- 12. Membuat kesimpulan serta rekomendasi (Yusuf, I.A, 2011).

**Identifikasi masalah.** Setelah survey tersebut, maka akan dilakukan identifikasi masalah dari keseluruhan masalah yang ditemukan pada survey. Dari proses identifikasi inilah, penulis akan menemukan permasalahan khusus yang dikaji lebih spesifik, sehingga fokus yang di fokuskan adalah penilaian implementasi *Good Governance* pada Koperasi perspektif sistem informasi (Studi Kasus pada Koperasi setia bhakti wanita )”.

**Menentukan topik.** Setelah proses identifikasi maka output yang dihasilkan adalah satu buah permasalahan yang akan penulis kaji lebih lanjut. Kemudian satu topik permasalahan tersebut akan penulis sempitkan menjadi satu topik/tema yaitu *Good Corporate Governance*.

**Menentukan tujuan.** Setelah topik dirumuskan, maka hal yang selanjutnya adalah menentukan tujuan/output akhir dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi *Good Corporate Governance*.



yang dokumentasi dilakukan ke obyek observasi dengan mengamati langsung berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, termasuk di dalamnya AD/ART, prinsip koperasi diantaranya keanggotaan yang bersifat sukarela, pengelolaan yang bersifat demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), kerjasama antar koperasi, hak dan kewajiban anggota, sistem pelaporan secara manual maupun secara yang terkoneksi dengan internet, dan lain lain yang diperlukan didalam penelitian ini.

Observasi dengan datang ke koperasi untuk secara langsung berinteraksi langsung mendapatkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan beberapa teknik.

Observasi merupakan pengumpulan data dengan terjun langsung langsung untuk mengamati secara langsung pada obyek yang diteliti. Observasi juga merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra (Bungin, 2007:115). Observasi dilakukan dengan pengumpulan bukti dalam mendukung hasil wawancara. Observasi juga melakukan pengamatan dari obyek yang diamati secara langsung.

Observasi merupakan penggunaan angket dengan menyerahkan kepada pengurus koperasi yang dapat digunakan bilamana mengetahui mengenai Koperasi yang merupakan alat pertanggungjawaban Koperasi dengan menggunakan berbagai pertanyaan yang dapat menjadi sebagai wakil disetiap obyek yang diteliti. Quisioner menggunakan skala ordinal dengan respon quisioner menggunakan skala likert yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), dan Sangat Setuju (SS).

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara langsung dengan responden dengan melakukan depth interview kepada pengurus yang tidak mengisi angket kusioner. Pertanyaan yang menggunakan angket kusioner sebagai dasar pertanyaan dan dapat berkembang dengan sendirinya dalam mengungkap kondisi sebenarnya menurut kebiasaan responden.

## Teknik Penentuan Data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

Data sekunder (Sugiyono, 2014:137) merupakan sumber data yang dapat diberikan kepada pengumpul data. Dengan cara penyebaran angket dan melakukan wawancara (*Depth Interview*) secara langsung yang berhubungan dengan konteks penelitian diantaranya pengurus dan anggota, data primer dilakukan kepada pengurus dan anggota koperasi.

Data sekunder (Sugiyono, 2014:137) merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data. Dengan cara melalui dokumen atau media lain yang masih berhubungan, berupa AD/ART, laporan keuangan anggota koperasi, Laporan Keuangan.

Penelitian ini mendukung dan menunjang hasil penelitian yang baik dengan populasi dan sampel. Berdasarkan kedua cara tersebut

penelitian yang melalui generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dapat diambil kesimpulan. Menurut Sugiyono (2010:81) dalam hal ini yaitu pengurus, pengawas dan anggota koperasi dengan jumlah kurang lebih 30 Orang.

Menurut Sugiyono (2010:81) merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode sampling dimana sistem pengambilan sampling tidak memberi kesempatan yang sama bagi tiap unsur atau anggota populasi yang dipilih. Teknik pengambilan sampel yang baik pengambilan *sampling purposive* dimana teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini masuk dalam kategori *Stratified Random Sampling* (Sugiyono, 1998).

## Prosedur Penelitian

Salah satu berkembang serta bersaing  
 diperlukan sistem tata  
 laksana untuk menciptakan suasana  
 kerja profesional, tangguh, mandiri,  
 transparan dan didukung  
 dengan menciptakan  
 sistem pengendalian di koperasi  
 sebagai SHU bagi anggota  
 yang dikenal oleh  
 masyarakat.

### Studi Pustaka Awal :

Pencarian artikel, pemahaman  
 koperasi, GCG, sistem informasi dan  
 penilaian menggunakan Prinsip GCG  
 dalam menilai Koperasi

### Observasi :

Observasi awal di Koperasi

Salah satu latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dihadapi yaitu  
 implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada Koperasi dengan  
 sistem informasi (Studi kasus pada Koperasi Setia Bhakti Wanita di

Metode Penelitian  
 Pendekatan Analisis Deskriptif  
 Penelitian *Research and  
 Development (RnD)*

### Studi Pustaka :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- *Good Corporate Governance (GCG)*
- Buku, Artikel Jurnal Penelitian tentang Koperasi dan GCG

*Good Corporate Governance (GCG)*

Menganalisis Data berdasarkan hasil  
 temuan dilapangan, quisioner dan  
 wawancara serta observasi

Implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* dengan penerapannya di  
 Koperasi berdasarkan perspektif sistem informasi

Sumber : Peneliti



## BAB V

### PENUTUP

*Good Corporate Governance* dalam perspektif sistem informasi koperasi pada Koperasi Setia Bhakti Wanita telah dilaksanakan dengan baik dengan uraian sebagai berikut:

1. Mendukung sistem informasi penggunaan dalam pengolahan koperasi dengan teknologi yang mendukung dengan perangkat yang baik dalam operasional *software* dan *hardware* agar lebih berkembang dan efisien dalam pelaksanaan pengendalian intern yang efisien dan dapat meningkatkan sehingga dapat menghasilkan meningkatnya jumlah anggota koperasi dan meningkatkan kinerja koperasi sesuai dengan prosedur dan pedoman.

2. Integrasi data melalui pengembangan *software* mulai dari pendaftaran anggota, simpan pinjam, toko swalayan, dan kegiatan lainnya yang terintegrasi dengan pengelolaan dana anggota dan dalam memudahkan pelayanan dan memudahkan informasi bagi para anggota.

3. Layanan yang disampaikan dengan tampilan atau *space* melalui website <http://setiabhaktiwanita.com> sehingga dapat memudahkan *stakeholder* memperoleh informasi yang valid atas keuangan Koperasi Setia Bhakti Wanita.

4. Teknologi dengan bekerja sama dengan pihak Bank dalam melakukan *banking* atau *mobile banking* dengan platform berbasis *web* atau *web base application* guna memudahkan pembayaran anggota melalui *e-banking* dan terintegrasi dengan *software* kopwan SBW untuk memudahkan pembayaran.

5. Pengawasan dilakukan secara transparan dan disampaikan oleh pengurus dengan pelaporan keuangan yang telah diaudit oleh pengurus dan disampaikan kedalam rapat anggota tahunan (RAT).

6. Transparansi terletak pada visi dan misi Koperasi SBW serta laporan yang merupakan salah satu dasar transparansi guna menghasilkan kinerja yang baik pada koperasi.

transparansi independensi terlaksana dengan secara baik dengan kemandirian pengelolaan koperasi yang dihimpun oleh anggota menjadikan modal awal yang diinvestasikan dananya untuk membangun koperasi SBW yang dapat mendukung kesejahteraan anggota selaras dengan visi dan misi yang sesuai tujuan dari koperasi.

Adanya terobosan baru untuk memajukan koperasi untuk tetap eksis berkembang di era digital dan melalui independensi pengurus dapat meningkatkan kegiatan guna menambah kesejahteraan anggota melalui SHU.

Transparansi akuntabilitas terlaksana dengan baik, mengikuti aturan AD/ART yang didalamnya meliputi visi dan misi dan mengacu pada Undang-undang No. 25 tahun 1992 membuktikan bahwa pertanggungjawaban terhadap aturan yang berlaku dilaksanakan dengan baik dan dapat dikondisikan sesuai dengan kondisi koperasi.

Memenuhi prinsip responsibilitas secara sistematis mengacu pada Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dan tiap tahun koperasi melaporkan pajak tepat waktu sesuai dengan tarif pajak yang berlaku untuk koperasi.

Salah satu unsur SARA dalam pengelolaan koperasi maupun dalam membangun keanggotaan.

Hasil pengamatan dilapangan dan angket kuisioner implementasi *Good Governance* pada koperasi pegawai kopertis wilayah 7, maka peneliti dapat mengajukan saran yang sekiranya dapat dikembangkan dikemudian hari untuk mencapai tujuan pengembangan koperasi dimasa yang akan datang.

Informasi teknologi dapat dimanfaatkan mengikuti perkembangan teknologi ini. Melalui *software* yang diintegrasikan keseluruhan komponen pelayanan pendaftaran anggota, simpan pinjam, toko swalayan, dan layanan lain yang melibatkan anggota yang berkaitan dengan point dan lain yang dapat dinikmati disetiap anggota koperasi setia bhakti wanita.

Pemanfaatan teknologi berbasis web berkenaan dengan pelayanan keuangan yang disampaikan dengan tampilan atau space khusus

salah website <http://setiabhaktiwanita.com> sehingga dapat memudahkan anggota memperoleh informasi yang valid atas keuangan koperasi setia bhakti wanita.

Salah koperasi ingin melakukan perancangan sistem teknologi informasi (tata kelola sistem informasi) dibutuhkan penentuan domain, menentukan control process, menentukan *Key Performance Indikator* (KPI), menentukan *Key Goal Indicator* (KGI).

Salah prinsip *Good Corporate Governance* (tata kelola) yang baik dalam pengelolaan koperasi guna menciptakan koperasi yang memiliki reputasi sama perusahaan dengan income yang besar dan tetap eksis dalam persaingan dunia perkoperasian.

Salah koperasi yang berdasarkan *tata kelola* diperlukan integritas sehingga dengan memiliki etika yang sebagai acuan bagi koperasi dalam menjalankan ~~kegiatan~~ usaha termasuk didalamnya etika pemangku koperasi guna menghindari *conflict of interest*.